

## **BAB II**

### **DINAMIKA SEJARAH DAN KARAKTERISTIK POLITIK REPUBLIK TURKI**

BAB II merupakan bab yang berisi penjelasan tentang dinamika sejarah dan karakteristik politik Republik Turki. Pembahasan pada bab ini akan diawali dengan ulasan mengenai sosok Mustafa Kemal Ataturk sebagai bapak pendiri Turki modern dan sejarah berdirinya Republik Turki. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan sistem politik Republik Turki dan dinamikanya di era Presiden Ataturk dan di era transisi. Setelah mengetahui dinamika sistem politik Republik Turki, maka pembahasan akan menuju pada karakteristik politik Republik Turki yang berkaitan dengan ideologi kemalisme dan peran militer sebagai penjaga ideologi kemalisme.

#### **A. Sejarah Republik Turki**

##### **1. Mustafa Kemal Ataturk**

Mustafa lahir di Salonika, daerah bagian Yunani yang terletak di kawasan Turki, pada tahun 1881. Seperti biasanya adat kebiasaan di jaman kekhalifahan Ottoman ketika itu, ia hanya memiliki nama Mustafa. Sedangkan nama keduanya, Kemal (yang artinya kesempurnaan) didapatinya dari gurunya yang terkesan dengan kecerdasan Mustafa. Nama Ataturk sendiri ( yang artinya bapak bangsa Turki ) dipilihnya sendiri sebagai pelengkap kediktatorannya. Turki di masa mudanya bukanlah suatu kerajaan yang dulunya memiliki kekuasaan di Timur jauh dan Semenanjung Balkan. Turki ketika itu hanyalah kerajaan kecil dimana setengah dijajah kekuatan-kekuatan asing yang memaksa kerajaan itu membuat perjanjian-perjanjian yang merugikan. Turki dikenal dengan “manusia Eropa yang sedang sekarat”. Sultan, seorang tiran dengan kekuasaan yang telah pudar, hidup dikelilingi oleh

kaum radikal yang menginginkan Turki menjadi negara modern.

Ayah Mustafa adalah seorang tukang kayu yang meninggal ketika ia masih berumur delapan tahun dan meninggalkan keluarga dalam kondisi miskin. Namun Mustafa muda tidaklah sedih, bahkan ia berkata pada ibunya, “ Saya akan jadi orang yang besar.” Pada saat ia berumur 20 tahun yakni tahun 1895, ia masuk sekolah militer di kota Manastir. Ia sangat cerdas, dingin, angkuh, dan unggul di antara kawan-kawannya sekelas. Pada tahun 1899 ia masuk perguruan tinggi perang di Istanbul sebagai kadet pasukan infantri, yang kemudian lulus pada Januari 1905 dengan pangkat Kapten Staf. Pada tahun 1907, Mustafa dipromosikan ke pangkat Mayor dan ditugaskan pada pasukan ketiga di Macedonia. Di tahun 1916 ia diangkat menjadi komandan wilayah Diyarbakar dengan pangkat Jenderal. Kemenangan singkat ketika menghadapi Rusia (7-8 Agustus 1916) memungkinkan Mustafa Kemal mencaplok Bitlis dan Mus kedalam wilayah Turki. Hingga di tanggal 6 Desember 1922, Mustafa Kemal menciptakan instrumen politik baru dengan mendirikan Partai Rakyat.

Mustafa Kemal memandang rendah Sultan dan seluruh apa yang dihasilkan oleh Kekaisaran Ottoman. Buku-buku terlarang yang berisikan inspirasi hidup dari kecermelangan dan kemajuan masyarakat Eropa dan Amerika dilalapnya semua. Ada timbul keheranan dalam pemikirannya, ”mengapa Turki tidak mampu menjadi negara modern dengan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya?. Ia kemudian menyimpulkan bahwa agama lah yang membuat Turki tenggelam dalam Feodalisme. Ia menganggap Islam menjadi sesuatu yang mati.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Jules Archer, *Kisah Para DIKTATOR*, Narasi, Jakarta, 2006 hal 89

## 2. Berdirinya Republik Turki

Republik Turki tidak pernah terlepas dari sosok pendirinya yakni Mustafa Kemal Attaturk. Pada 29 Oktober 1923, Majelis Nasional Agung memproklamirkan berdirinya Negara Republik Turki, dan sekaligus mengangkat Mustafa Kemal Attaturk sebagai presiden pertama. Sejak saat itu Turki tidak lagi sebagai Turki Utsmani atau kesultanan Ottoman dan Khilafah Utsmani. Akan tetapi Turki menjadi Republik Turki. Mustafa Kemal Attaturk telah mengubah Turki yang semula berbentuk kerajaan (kekhalifahan) dan bahkan dianggap merupakan simbol pusat kekuatan Islam dunia, menjadi suatu negara modern berbentuk republik. Bukan saja mengubah bentuk negara dan pemerintahan, Mustafa Kemal juga melakukan reformasi total di segala bidang kehidupan seperti dalam pemerintahan, hukum, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Dengan dihapusnya sistem Khilafah di Turki ini menjadi babak baru sekularisme secara besar-besaran. Mustafa Kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan Islam dan berkiblat ke zaman pencerahan barat.<sup>2</sup>Pada masa 1923 hingga tahun 1950 merupakan masa revolusi Turki dari Islam ke Sekuler. Reformasi Mustafa Kemal Attaturk dalam bidang sosial budaya di Republik Turki antara lain mengeluarkan peraturan tentang tata cara berpakaian pada September dan November 1925. Laki-laki dilarang menggunakan pakaian keagamaan dan penggunaan topi torbus yang sebelumnya pada masa kekhalifahan Turki Utsmani biasa digunakan. Kaum perempuan pun tidak luput dari peraturan pelarangan memakai jilbab. Penggunaan pakaian serta topi diwajibkan seperti yang digunakan oleh bangsa Barat baik laki-laki maupun perempuan. Kemudian

---

<sup>2</sup> John Freely, Istanbul Kota Kekaisaran, Alvabet, Jakarta, 2002, halaman 378

kalender Hijriah pun diganti dengan kalender Georgian seperti kalender yang digunakan di negara-negara Barat.

Syariah Islam yang sebelumnya digunakan sebagai landasan dasar hukum masyarakat Turki diganti dengan undang-undang sipil yang diadopsi dari hukum Swiss pada 1926. Selain itu adanya peraturan tentang diwajibkannya penggunaan marga bagi setiap masyarakat Turki, sehingga nama-nama gelar seperti Kamal, Ghazi, Pasha, Bey, Shaikh, Effendi, Hanim haruslah dihapuskan. Pada 1928, disahkannya oleh Majelis Nasional Agung Turki dalam pengadopsian dan penerapan huruf Latin. Pada Tahun 1932 hal tersebut disusul dengan pemurnian bahasa Turki dari dominasi unsur-unsur bahasa Arab dan Persia.<sup>3</sup>

Mustafa kemal memindah ibukota yang tadinya di Istanbul diubah ke Ankara. Kantor dan instansi pemerintahan yang berbau Islam pun dibubarkan. Kantor yang dibubarkan oleh Mustafa Kemal yakni kantor Seyhul Islam dan kementerian syariat. Sekolah-sekolah agama juga ikut ditutup. Semua pelajaran tentang agama baik Islam ataupun Kristen dibatasi. Pada 20 April 1924, Majelis Nasional Agung mengeluarkan undang-undang anti – teokratis. Mustafa kemal melakukan reformasi besar-besaran dengan menghilangkan nilai-nilai Islam dan berkiblat kepada Barat. Perubahan yang dilakukan oleh Mustafa kemal dengan mencabut Islam ke akarnya sehingga umat Islam dan agama lainnya sangat dibatasi dalam menjalankan ibadah. Satu hal yang dianggap sebagai kemajuan adalah perempuan diberikan kesempatan untuk ikut dalam pemerintahan . Namun umat Islam perempuan dilarang menggunakan jilbab dan simbol Islam yang lain.

Reformasi yang dilakukan oleh Mustafa kemal terdiri dari : Penghapusan kesultanan (1922) yang diiringi dengan

---

<sup>3</sup> *Ibid*, halaman 379

pendirian Republik Turki ( 1923), penghapusan kekhalifahan (1924), penghapusan Seyhulislam (1924), penghapusan Kementerian Urusan Agama (1924), penghapusan pengadilan Syariah (1924), penghapusan seklaah madresse (1924), pelarangan *tariqa* (kelompok-kelompok persaudaraan agama) (1925), pelarangan *fez* atau kopiah (1925), pengadopsian kalender Gregorian (1925), pengadopsian Kode Swiss dalam perundang-undangan sipil (1926), pengadopsian numeral ( sistem angka) Eropa (1928), pengadopsian aksara Latin (1928), penghapusan pasal II Konstitusi 1924 tentang penetapan Islam sebagai agama negara, pemberian hak pilih kepada perempuan dalam pemilu kabupaten/kotamadya pada 1930 dan pemilu nasional pada (1934).Inisiasi program penghilangan kata-kata Arab dan Persia dari Bahasa Turki (1931), pengadopsian sistem metrik (1931), pelarangan adzan memakai bahasa Arab dan digantikan dengan bahasa Turki (1932), pengadopsian nama marga (1934), pengantian hari libur dari Jumat ke Minggu (1935).<sup>4</sup>

Dengan demikian program sekularisasi itu menempuh empat fase :

- (1) *Sekularisasi simbolis*, yakni melakukan pembaruan dalam aspek-aspek kebudayaan nasional atau kehidupan sosial yang memiliki identifikasi simbolis Islam.
- (2) *Sekularisasi institusional*, yakni perubahan-perubahan tatannan organisasi yang dirancang untuk menghancurkan kekuatan institusional Islam.
- (3) *Sekularisasi fungsional*, yakni melakukan perubahan-perubahan fungsi khusus institusi-institusi keagamaan dan pemerintahan.

---

<sup>4</sup> Tim Jacoby, *Social Power and the Turkish State*, London and New York, Frank Cass, 2004, Hal.80

- (4) *Sekularisasi legal*, yakni perubahan-perubahan dalam struktur hukum masyarakat.<sup>5</sup>

Guna memperkuat kebijakan-kebijakan tersebut, Rezim Mustafa Kemal melakukan tindakan represif kepada masyarakat dan lawan-lawan politik yang dinilai anti kemajuan. Akibatnya, ribuan orang dieksekusi dan dijebloskan kedalam penjara, termasuk tokoh pembaharuan Islam, Muhammad Said Nursi dan Ziya Gokalp, penyair terkemuka yang sebelumnya memuji kepahlawanan Mustafa Kemal dalam perjuangannya mengusir pasukan Inggris. Dalam kenyataannya, praktik sekularisme Kemal menjadi kebijakan anti-Islam. Dalam sebuah peristiwa, Mustafa Kemal tidak ragu memberangus sebuah desa di wilayah religius Konya karena melanggar larangan mengumandangkan adzan dan mencopot paksa jilbab yang dikenakan seorang perempuan.

Mustafa Kemal Atatürk berkuasa sebagai Presiden Turki dari tahun 1923 sampai 1938 yang bekisar selama 15 tahun. Ini merupakan waktu yang cukup bagi Mustafa Kemal untuk merombak dan mengubah tatanan kehidupan dan kebijakan politik di Turki. Mustafa Kemal akhirnya meninggal pada 10 November 1938 karena mengidap penyakit sirosis hati akut dimana sebelum meninggal, pegawainya menemukan Musafa Kemal mabuk sambil bernyanyi di kedai Yunani, kemudian membawa Mustafa Kemal ke rumahnya tempat Ia meninggal.

## **B. Dinamika Sistem Politik Republik Turki**

Dalam Konstitusi Turki yang disahkan pada 1982 dinyatakan bahwa bentuk negara di Turki adalah Republik Demokratik Sekular dengan bentuk pemerintahan yang terbagi atas kekuasaan *legislatif* yakni Majelis Nasional Agung kemudian kekuasaan *eksekutif* yang berupa presiden dan dewan menteri, selain itu terdapat kekuasaan *yudikatif*.

---

<sup>5</sup> Binnaz Toprak, *ISLAM DAN PERKEMBANGAN POLITIK DI TURKI*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1999 Hal 72

Kekuasaan yudikatif sendiri terbagi menjadi tiga bagian, yakni pengadilan pidana, pengadilan perdata dan pengadilan khusus. Sementara itu mahkamah militer masuk ke dalam pengadilan militer. Mahkamah konstitusi merupakan kekuasaan pengadilan yang tertinggi. Presiden berperan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih oleh Majelis Nasional Agung dengan masa jabatan 7 tahun, legislatif dipilih oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun. Presiden adalah kepala negara memiliki fungsi atau kekuasaan eksekutif dan merupakan panglima tertinggi angkatan bersenjata. Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk perdana menteri dan anggota Majelis Nasional. Perdana menteri berfungsi untuk memimpin kabinet atau dewan menteri dan berkuasa memimpin kegiatan pemerintahan.

Sejak adanya amandemen 2017, presiden dipilih oleh parlemen, kemudian presiden menunjuk dan mengangkat perdana menteri. Kemudian perdana menteri menyusun Dewan Menteri dengan susunan atas persetujuan presiden. Presiden tidak dapat memberhentikan menteri tanpa proposal dari perdana menteri. Perdana menteri menjalankan pemerintahan sehari-hari. Perdana menteri dan Dewan Menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden tetapi dengan parlemen. Presiden tidaklah berfungsi sebagai simbol negara saja, namun memiliki kewenangan mengembalikan seluruh undang-undang (kecuali UU Anggaran) kepada Parlemen untuk dipertimbangkan kembali masa berlakunya. Parlemen bisa saja untuk tetap memberlakukan Undang-Undang. Namun jika Presiden menolak, Presiden bisa menyerahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskannya. Presiden juga berwenang untuk mengadakan pemilu ulangan jika dinilai terjadinya kebuntuan politik. Peran Presiden begitu besar karena memiliki kewenangan dalam memutuskan penggunaan Angkatan Bersenjata Turki, mengangkat kepala-kepala Staf Angkatan Perang, TGNA (*Turkish Grand National Assembly*) dan berposisi sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang.

TGNA adalah badan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan 5 tahun yang berkuasa membuat Undang-Undang.

Presiden sebagai kepala negara lebih banyak berperan secara simbolis sebagai pemimpin negara dan bangsa Turki dan fungsi-fungsi yang lain. Pasca Amandemen 1982 peran presiden menjadi terbatas dan kemudian memunculkan adanya wacana penguatan peran presiden. Namun sejak 2007 presiden dipilih oleh pemilu rakyat hal inilah yang kemudian dirasa perlu untuk meningkatkan peran presiden dalam pemerintahan.

Dewan menteri adalah lembaga kolektif, berperan sebagai eksekutif yang memiliki tugas menyelenggarakan pemerintahan. Sebagai mana sesuai dengan konstitusi 1982, Dewan menteri sebagai pemimpin menteri dan administrasi pemerintahan. Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden dari anggota parlemen. Para menteri dipilih oleh Perdana Menteri dari anggota parlemen dan kemudian ditetapkan oleh presiden. Dewan Keamanan Nasional adalah dewan yang membahas persoalan keamanan nasional. Dewan Keamanan Nasional satu kali dalam dua bulan atau lebih sering jika keadaan keamanan negara terganggu. Dewan Keamanan ini beranggotakan Presiden, Perdana Menteri, Panglima Angkatan Bersenjata, para wakil Perdana Menteri, Menteri Keadilan, Menteri Pertahanan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, dan Udara, serta komandan Jandarma.

## **1. Sistem Politik era Mustafa Kemal Ataturk**

Sistem politik di era Mustafa Kemal Ataturk ini bisa disebut sebagai sistem satu partai. Di awal berdirinya Republik Turki, Mustafa Kemal berupaya keras untuk mengontrol majelis dan menjalankan ideologinya melalui pendirian partai politik dengan nama *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) atau dalam bahasa Indonesia Partai Rakyat Republik pada 9

September 1923. Partai ini menjadi mesin penggerak yang efektif dalam menjalankan dan mempertahankan ideologi Sekularisme di Turki. Bisa dikatakan bahwa partai CHP adalah partai tunggal yang memerintah Turki sampai pada tahun 1945. Dengan partai inilah Sekularisme bertahan di pemerintahan, sehingga Presiden dan Perdana Menteri diduduki oleh orang sekuler. Dengan mesin partai politik ini juga Mustafa Kemal merekrut pemuda Turki yang dinilai cerdas dan memiliki pandangan yang luas, serta berkeinginan untuk menjadi pemimpin. Seperti Inonu, yang kemudian melanjutkan pemerintahan Turki setelah meninggalnya Mustafa Kemal. Inonu adalah seorang pemuda yang cerdas yang dididik oleh Mustafa Kemal hingga Inonu pun mendapatkan inspirasi kepemimpinan dari seorang Mustafa Kemal. Dengan demikian, ideologi Kemalisme akan terus bertahan dibawah pengikut setia Mustafa Kemal.

Pada 17 Oktober 1924, para perwira yang kecewa dengan manuver politik Mustafa Kemal, membentuk Partai Rakyat Progresif atau *Terakkiperver Cumhuriyet Firkasi* (TCF). Namun partai ini tidak bertahan lama karena dibubarkan oleh Mustafa Kemal pada 5 Juni 1925. Kemudian pada tahun 1930 Mustafa Kemal memberi peluang bagi hadirnya Partai Republik Merdeka atau *Serbest Cumhuriyet Firkasi* (SCF) yang dipimpin Fethi Okyar. Namun partai ini tidaklah berjalan lama dan membubarkan diri pada tahun yang sama karena kecewa dengan kecurangan CHP dalam pemilu lokal. Akibatnya, sistem dwi partai gagal diterapkan, dan sistem partai tunggal pun tetap bertahan.<sup>6</sup>

Mustafa Kemal Atatürk memang membuat suatu negara dengan konstitusi yang liberal, namun ia memandang politik kepartaian dengan penuh rasa curiga dan tidak percaya. Ia menganggap oposisi dapat membahayakan perubahan-perubahan yang dilakukannya, maka dengan sistem satu partai

---

<sup>6</sup> M Alfian Alfian, *Militer dan Politik di Turki*, PT PENJURU ILMU SEJATI, Bekasi, 2015, hal 41

dan “menghalangi” adanya partai lain yang muncul dianggap akan lebih baik untuk melancarkan perubahan dan pembaharuan yang dilakukannya dalam politik Turki.

## **2. Sistem Politik Transisi**

Setelah Mustafa Kemal meninggal, Turki mengalami transisi politik dari sistem satu partai menjadi multipartai. Secara garis besar sistem ini mengikuti tiga kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kekuasaan eksekutif Turki memiliki struktur ganda seperti Presiden Turki dan Dewan Menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Jabatan Presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu sampai pada tahun 1950. Inonu sendiri adalah pengikut setia dari Mustafa Kemal yang sebelumnya menjabat sebagai Perdana Menteri dan tentu saja menjadi pelanjut ideologi Kemalisme di Turki. Inonu tampil sebagai tokoh politik paling penting di Turki. Selain sebagai Presiden, Inonu juga mendapat tempat yang sangat istimewa di partainya. Pada Kongres Luar Biasa CHP ia diangkat sebagai ketua umum permanen partai CHP.

Dengan berakhirnya Perang Dunia ke 2, perubahan politik pun tak terelakkan. Turki yang sebelumnya memosisikan diri netral dalam Perang Dunia ke 2 dengan diktum Kemalis “damai di rumah, damai di seberang” (*peace at home, peace abroad*), pada 1945 memutuskan untuk bergabung dengan sekutu dan ikut menandatangani piagam PBB. Turki tampak lebih tertarik dengan *Marshall Plan* dari Amerika Serikat (AS), daripada membangun aliansi dengan Uni Soviet. Pilihan inilah yang kemudian menyebabkan demokratisasi politik menjadi tidak terelakkan.

Pada awalnya Presiden Inonu menginginkan memperkuat sistem *pseudo-demokratik* dan tradisi partai hegemonil., namun tekanan politik begitu kuat. Pada Juni 1945, empat politisi CHP yakni Adnan Momnderes, Celal Bayar, Refik

Koraltan dan Fuat Koprulu mengajukan Memorandum Empat (*Dortlu Takrir*) di parlemen yang berisi permintaan perubahan agar konstitusi Turki menerapkan demokrasi penuh. Inonu menerima permintaan tersebut. Kebijakan multipartai pun bak gayung bersambut dengan munculnya partai-partai baru seperti; Partai Pembangunan Nasional atau Milli Kalkina Partisi (MKP), Partai Demokrat atau Demokrat parti (DP), Partai Petani dan Pekerja Turki (Turkiye Sosyalist Emekci ve Koylu Partisi (TSEKP)). Partai yang terakhir disebutkan adalah partai berhaluan kiri yang didirikan pada Juni 1946. Namun pada Desember 1949, partai ini dilarang seiring menguatnya arus anti-komunisme.<sup>7</sup>

Dalam hal ini, Yilmaz menjelaskan fenomena demokrasi multipartai tersebut sebagai proses “demokrasi dari atas”, karena ia tidaklah hadir dari desakan arus bawah atau akar rumput, namun terlahir dari hasil “reformasi dari atas” dimana elit berkuasa tidak mampu mengelak akan perubahan. Konstelasi politik yang baru telah terbentuk disisi lain popularitas CHP merosot. CHP dipandang bertanggungjawab atas proyek-proyek modernisasi yang tidak menjangkau ke daerah-daerah atau desa-desa semasa era partai tunggal CHP.

Setelah era Presiden Inonu, proses demokrasi pun berlangsung dalam pemilihan umum di Turki. Partai Demokrat berhasil menang telak saat pemilu pasca rezim partai tunggal. Maka terpilihlah Ali Adnan Menderes sebagai Perdana Menteri pertama Turki, sedangkan ketua umum Partai Demokrasi Celal Bayar sebagai Presiden Turki. Saat kampanye Partai Demokrat menjanjikan reformasi dan kebebasan beragama. Pemerintahan baru yang dipimpin oleh Adnan Menderez segera memulihkan kembali hak-hak umat Islam. Larangan ziarah dicabut, masjid dikembalikan fungsinya, dan suara azan kembali dikumandangkan dalam bahasa Arab. Adnan sendiri adalah seorang liberal pro-barat. Namun langkah beraninya tersebut mengundang kemarahan

---

<sup>7</sup> *Ibid*, halaman 45

militer sehingga pada akhirnya pemerintahan digulingkan oleh militer dibawah Cemal Gursel.

Setelah itu diadakannya pemilihan umum di Turki dan partai yang berkuasa di pemerintahan adalah CHP. Setelah kepergian Mustafa Kemal Ataturk, penerus ideologi sekuler sangat aktif dalam bidang militer dan partai politik. Sehingga dalam pemilihan umum di Turki, selalu dimenangkan oleh partai yang berideologikan sekuler yakni CHP. Kalaupun partai sekuler bisa dikalahkan dengan partai yang lain, kelompok sekuler masih mempunyai militer sebagai kekuatan tambahan. Terbukti dengan adanya beberapa kudeta yang dilakukan oleh militer atas pemerintahan yang tidak sepaham dengan kelompok sekuler yang selalu menjaga ideologi kemalisme.

### **C. Karakteristik Politik Turki**

#### **1. Kemalisme Sebagai Identitas Republik Turki**

Kemalisme adalah sebutan pemikiran dan ide-ide sekuler yang diusungkan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Kemalisme disebut juga *Ataturkculuk* atau *Ataturkcu Dusunce* yang bersimbolkan enam anak panah atau *alti ok*, yang berisikan enam prinsip yakni:

1. Republikanisme (*cumhuriyetcilik*), merupakan penghapusan seluruh sistem politik dan pemerintahan yang ada di zaman Turki Ustmani.
2. Populisme (*halkcilik*), merupakan kesamaan hak untuk menduduki semua jabatan di pemerintahan.
3. Nasionalisme (*milliyetcilik, ulusculuk*), prinsip ini digunakan untuk menghilangkan nilai sosial budaya Turki Ustmani. Artinya menerapkan nilai budaya Barat di segala aspek kehidupan.
4. Sekularisme (*laiklik*), prinsip ini berguna untuk memisahkan peran agama dalam sistem pemerintahan,

agama tidak boleh mencampuri semua urusan pemerintahan.

5. Reformisme (*devrimcilik*) , untuk mewujudkan Turki modern maka Turki harus mengadopsi cara dan kebudayaan baru, ilmu pengetahuan, dan nilai kehidupan bangsa Eropa.
6. Statisme, bertujuan untuk memperbaiki kesulitan ekonomi Turki setelah perang kemerdekaan, guna menunjukkan sistem intervensi negara terhadap semua aspek kehidupan demi mencapai kemakmuran dan kesejahteraan.<sup>8</sup>

Ideologi Kemalisme juga dipandang sebagai “ekspresi formasi Atatürk untuk menciptakan negara modern, demokratis ,dan modern yang dipandu oleh pendidikan dan penguasaan ilmu pengetahuan berdasarkan prinsip-prinsip positivisme, rasionalisme, dan pencerahan “. Kemalisme semacam itu sering disebut sebagai “agama Turki”, atau setidaknya, kemalisme telah merekonstruksi suatu batasan tersendiri mengenai “Islam Turki”.

Revolusi Kemalisme sejak awal dimaksudkan sebagai rekonstruksi identitas baru Turki yang berpijak pada prinsip anti- Usmaniyah dan anti Islamisme. Menurut kelompok sekuler, sejarah Turki kuno (pra-Islam) pada dasarnya telah memiliki akar modernisme dan demokrasi yang merefleksikan budaya asli mereka. Namun dalam perkembangannya, nilai-nilai kebajikan tersebut terhalangi oleh masuknya Islam dan eksistensi imperial Dinasti Ustmani. Oleh karena itu ,revolusi kemalisme dianggap sebagai upaya pembebasan Turki menuju warisan kesejarahan mereka dan sekaligus mengembalikan Turki kepada sumber peradaban dunia (barat). Revolusi Kemalisme dianggap sebagai proses transformasi total dari keyakinan, pandangan, pemikiran, gaya hidup, dan institusi islamisme menuju Turanisme.

---

<sup>8</sup> Dr. Syafiq A. Mughni, Sejarah Kebudayaan islam Di Turki, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997, Hal 151

Adanya revolusi Kemalisme bertujuan untuk memutus Turki dari sejarah masa lalu, yaitu masa Kekhalifahan Turki Utsmani yang merupakan simbol peradaban Islam (1453-1924) dengan pengaruh kuat dari kebudayaan Arab dan Persia. Selain itu, revolusi ini juga bertujuan untuk membawa Turki kepada suatu tingkat kemajuan (modernisasi) seperti yang telah diraih oleh bangsa-bangsa barat. Modernisasi menurut Mustafa Kemal Attaturk merupakan pembaratan secara keseluruhan, sehingga menurutnya sebuah bangsa dapat dikatakan modern apabila telah melakukan pembaratan.

Bagi Mustafa kemal, peradaban adalah berarti peradaban seperti barat dengan segala sesuatunya. Salah seorang pengikut Mustafa kemal bernama Agouglu menyatakan, Peradaban barat dapat mengalahkan peradaban yang lainnya, bukan hanya karena kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuannya, namun karena semua aspek dari peradaban tersebut, baik yang positif maupun negatif. Dalam hal ini tema sentral dari pandangan Mustafa Kemal tentang pembaratan (Westernisasi) adalah bahwa Turki harus menjadi sekuler seperti bangsa barat. Segala hal yang tidak seiring dengan paham ini maka harus dihilangkan. Sejak awal Ia menolak ide-ide sintesis-konvergensi antara peradaban barat dan timur. Turki harus mencontoh barat secara keseluruhan. Westernisme, Sekularisme, dan Nasionalisme merupakan dasar pembaharuannya. Pembaharuan pertama diarahkan pada konstitusi negara, disini diadakan sekularisasi. bagi mustafa kemal pemerintah harusnya dipisahkan dari agama dan kedaulatan berada di tangan rakyat. Dengan ideologi Kemalisme inilah tatanan politik dan pemerintahan Turki mengalami perubahan yang signifikan setelah terbentuknya republik Turki pada 1923.

Modernisme Turki pasca – Dinasti Ustmani adalah pendirian negara nasional berbentuk republik yang meliputi penduduk pedalaman Anatolia, para pengungsi Balkan, dan etnik Kurdi di bawah prinsip-prinsip Sekularisme dan Westernisme. Setiap adanya upaya untuk mendesakkan

kembali spiritualitas Islam akan dianggap sebagai ancaman eksistensial Republik Turki modern karena hendak mengembalikan Turki ke zaman kemunduran, Para individu atau kelompok yang terlibat dalam upaya ini disebut sebagai kelompok reaksioner atau *Irtica*.

Modernisasi cara Ataturk menghendaki kemutlakan westernisasi dan sekularisasi radikal secara sistematis untuk menghadirkan identitas baru Turki. Maka kasus Turki berbeda dengan Jepang yang akomodatif terhadap nilai-nilai tradisionalnya. Turki modern tidak dibangun dengan sisa-sisa nilai Ustmani, namun dibentuk oleh elit-elit Kemalis yang berhasil menang melawan penjajah asing dan rezim lama, seperti kasus Peter yang Agung membentuk Rusia modern, Ataturk membuka pintu selebar-lebarnya bagi Barat.

Menurut WJ Korap Kaprovic, doktrin politik kemalisme tidak lahir dari pemikiran yang seksama, namun lebih merupakan produk teori yang lahir karena reaksi, praktik, dan pengalaman politik Mustafa Kemal dalam melihat kondisi Turki pada saat itu. Mustafa Kemal melihat Turki sedang dikelilingi musuh yang mencoba melemahkan dan bisa saja akan mencaplok Turki. Kemunduran Turki karena keberadaan kelompok reaksioner (Islam) beserta simbol politiknya yang lapuk ( Turki Ustmani) . Untuk itu maka Turki harus memiliki militer yang kuat dan selanjutnya menyingkirkan kekuatan reaksioner yang menjadi hambatan utama modernisme Turki. Pandangan ini pula, menurut Graham Fuller dalam *The New Turkish Republic*, menjadi daya dorong dirinya dalam menjalankan politik paranoid , yakni mendorong militer memperkokoh kekuatan domestik dan membenarkan upaya superrepresif dalam menjaga negara dari ancaman yang dipersepsikan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Dzakirin, *Kebangkitan Pos-Islamisme, Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki memenangkan Pemilu*, PT ERA ADICITRA INTERMEDIA, Solo, 2012, hal 105-106

Dalam level praksis politik, pemikiran Kemalisme sejak berdirinya telah berturut-turut mengalami evolusi karena adanya tantangan Islamisme. Kemalisme berevolusi dari ideologi otoritarianisme menjadi sebagai filsafat hidup. Pada awalnya kemalisme adalah ideologi otoritarianisme partai tunggal (1920-1950) dengan agenda politik westernisme. Namun pasca kudeta 1960, Kemalisme menjadi ideologi setengah resmi negara (Konstitusi 1961). Dalam Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa semua produk hukum yang berlaku di negara Turki tidaklah boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip kemalisme. Evolusi pemikiran kemalisme mencapai puncaknya ketika militer melakukan kudeta lagi pada 1980. Dalam konstitusi baru 1982, Kemalisme menjadi ideologi resmi Republik Turki. Pada evolusi ketiga ini, ideologi Kemalisme menjadi prinsip kewarganegaraan dan filosofi hegemonik Republik Turki modern. Dengan demikian, ideologi ini bermetamorfosis dari awalnya ideologi politik kenegaraan menjadi filosofi dan gaya hidup rakyat Turki. Sekularisme seakan-akan berubah menjadi “agama wajib” bagi seluruh rakyat Turki.

## **2. Militer Sebagai Penjaga Ideologi Kemalisme**

Republik Turki didirikan melalui revolusi militer yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Atatürk. Setelah itu prinsip penggulingan kekuasaan menjadi cara untuk membangun negara republik dan melestarikannya. Revolusi juga menjadi salah satu dari enam prinsip undang-undang Turki (kemalisme) yang diwasiatkan Mustafa Kemal satu tahun sebelum meninggal pada tahun 1937 kepada pasukan Turki. Mustafa Kemal mengatakan bahwa militer merupakan pembangunan Turki modern dari pemimpin revolusinya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Syarif Taghian, Erdogan Muadzin Istanbul Penakluk Sekularisme Turki, PUSTAKA AL-KAUTSAR, Jakarta, 2012, halaman 97

Sejak saat itu militer Turki menganggap dirinya sebagai penjaga Republik Turki dan yang dipercaya untuk menjaga enam prinsip Kemalisme. Cara penafsirannya yang khusus terhadap undang-undang menjadi sarana untuk melakukan segala penggulingan kekuasaan yang dilakukannya. Maka dengan itu militer dapat menumbangkan pemerintah-pemerintah sipil yang terpilih ketika dinilai menyimpang dari jalan yang merusak prinsip-prinsip Republik Turki, terutama Sekularisme.

Untuk mengetahui mengapa militer memiliki derajat tinggi dalam politik, dapat dilihat dari aspek sejarah bagaimana negara Republik Turki terbentuk. Ada dua kondisi sosio-politik yang melatar belaknginya. Pertama, adanya ancaman kolonialisme negara Barat atas warisan imperium Turki Ustmani pasca Perang Dunia 1. Ketika itu Barat membagi-bagi bekas wilayah kekuasaan Turki Ustmani di kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah kepada Prancis dan Inggris dalam perjanjian Sykes Picot. Semenjak itulah Turki terlibat dalam perang pembebasan melawan Inggris dan sekutunya pada 1912-1922. Saat itu gerakan Opsir Muda menyalahkan kekacauan politik kepada Imperium Ustmani. Kedua, adanya ketakutan balasan atas pendukung islamis pasca dibubarkannya Turki Ustmani. Mustafa Kemal menanggapi mereka sebagai kaum reaksioner yang bertujuan membawa Turki ke era keterbelakangan. Itulah mengapa Mustafa Kemal menjadikan kekuatan militer sebagai alat yang menopang kekuasaannya.

Militer merupakan pengawal kekuasaan yang efektif. Sebagai sosok sentral dalam masa formatif Republik Turki, Mustafa Kemal pada awalnya sebenarnya melarang militer terlibat dalam dunia politik, bahkan diatur dalam hukum pidana militer 1632 pada Mei 1930. Pasal 148 hukum pidana tersebut melarang anggota militer menjadi anggota partai politik dan aktif dalam politik, serta menyatakan bahwa militer netral dari politik. Namun disisi lain militer juga diposisikan sebagai garda terdepan revolusi dengan hak untuk ikut campur

tangan dalam politik, jika kelangsungan hidup negara dalam bahaya. Dalam konteks yang ini militer diposisikan sebagai penjaga republik (*nigahban-i cumhuriyet*) sekaligus pengawas republik (*cumhuriyetin bekcisi*) menjadi lembaga yang paling berhak menginterpretasikan Kemalisme. Akibatnya justru selama bertahun-tahun, militer secara sistematis melanggar prinsip ketidakterlibatan dalam politik.<sup>11</sup>

Dalam praktiknya, militer memiliki ruang otonomi yang sangat luas. Kewenangannya tidak hanya mencakup urusan domestik militer, namun juga wewenang melakukan intervensi dalam politik dimana intervensi tersebut selalu dipahami pihak militer sebagai upaya menjaga kemurnian ideologi kemalisme. Militer yang mengklaim sebagai penjaga ideologi Turki modern dibantu para elit birokrasi dan dunia peradilan. Mereka ini dalam politik modern Turki dikenal menjadi bagian kelompok Deep State (Derin Devlet), yakni koalisi anti-demokrasi super rahasia namun sangat berpengaruh dalam sistem politik Turki. Koalisi ini melibatkan elemen tingkat tinggi dalam struktur dinas intelijen, militer, kepolisian, dan mafia yang dalam praktiknya anti-Islam, anti-kiri, dan anti etnis Kurdi. Eksistensi kelompok ini diuntungkan karena aliansi dan dukungan simbiotik mereka dengan AS (NATO) dalam peran dingin melawan Komunisme. Sebagai gantinya, militer Turki mendapatkan dukungan penuh AS dan Barat, termasuk terjadinya kudeta 1980. AS mendukung dan terlibat dalam kudeta 1982. Sinyal dukungan ini diberikan karena Amerika khawatir dengan radikalisme kelompok kiri dan kebangkitan kelompok Islam.

Dukungan Barat terutama Amerika Serikat merupakan salah satu sumber kekuatan dan memperkuat pengaruh pasukan militer secara politik. Ketika Turki menerapkan sistem multi-partai dalam pemilu dan terlaksanakannya pemilu demokratis pertama tahun 1950, hubungan militer dengan negara-negara barat memasuki babak baru, terlebih setelah

---

<sup>11</sup> M Alfian Alfian, Op.cit Hal.44

Turki bergabung dengan NATO dan menjadi pendukung penting masa perang dingin melawan blok komunis Uni Soviet.

Semua itu membantu meningkatkan peran pasukan militer Turki dalam panggung politik Internasional. Terlebih lagi ketika Washington dan negara-negara anggota NATO memandang Turki sebagai koalisi yang strategis. Tidak menunggu lama, militer Turki menjadi pasukan terbesar dalam NATO setelah Amerika Serikat. Disamping itu, para komandan militer Turki yang menunjukkan dukungan dedikasi, dan loyalitasnya terhadap Washington mendapatkan bantuan yang tak terhitung jumlahnya dari negara paman sam tersebut, dimana negara inilah yang menjadi sponsor utama berbagai pemberontakan dan kudeta militer yang terjaddii Turki.

Sebagai pemegang tafsir tunggal ideologi, militer memiliki pengaruh sangat besar dalam politik. Militer terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses politik Turki, termasuk melakukan kudeta jika dianggap genting. Karena kedudukan spesial militer dalam politik Turki, Kastaf Jenderal Dogan Gures pada 1992 mengatakan bahwa Turki adalah negara militer. Namun pasca kudeta 1980, pengaruh militer lebih bersifat tidak langsung. Militer memanfaatkan eksistensi Dewan Keamanan Nasional (*Milli Gunvelik Kuruluk*) sebagai alat kepentingan politik militer. Kebijakan keamanan nasional oleh Dewan Keamanan Nasional dirumuskan dalam dokumen yang disebut sebagai Buku Merah. Buku Merah ini menjadi dokumen politik paling rahasia di Turki. Selain karena derajat kerahasiaannya, dokumen ini hanya mengalami satu atau dua kali revisi dalam setiap dasawarsanya. Kendati badan ini dipimpin presiden sebagai komandan angkatan bersenjata, namun praktiknya menjadi kendali militer atas pemerintahan sipil.

Menurut Metin Helper, kewenangan tidak terbatas militer Turki dalam kehidupan politik mencakup tiga hal. *Pertama*, campur tangan militer dalam kehidupan politik

dilegalisasikan dan terinstitusionalisasi dalam kehidupan politik formal pasca Kudeta 1980. Konstitusi 1982 menjadi konstruksi institusionalisasi kepentingan militer dalam politik, *Kedua*, komando militer memberikan kebebasan para perwira dibawahnya untuk melakukan pelbagai inisiatif politik yang dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan politik militer sesuai dengan posisi teritorialnya. *Ketiga*, pasca kudeta 1980, militer menggantikan intervensi langsung mereka menjadi tidak langsung melalui keberadaan Dewan Keamanan Nasional yang menjadi wadah tertinggi para jenderal dalam lembaga sipil. Militer secara bertahap hendak menghilangkan citra sebagai penghambat demokrasi seiring keinginan negara Turki untuk masuk ke dalam Uni Eropa.<sup>12</sup>

Militer sebagai penjaga ideologi Kemalisme telah melakukan beberapa kali kudeta kepada pemerintah yang dianggap berlawanan dengan ideologi Kemalisme. Kudeta pertama dilakukan atas pemerintahan yang terpilih secara demokratis, yakni Adnan Menderez pada 1960, kemudian terjadi kudeta berturut-turut pada tahun 1971, 1980, dan 1997. Kudeta tersebut hampir saja menjadi tradisi sepuluh tahunan militer Turki untuk menjaga kekuasaan dan kendali atas pemerintah sipil. Alasan formal dari kudeta-kudeta tersebut adalah menjaga ideologi kemalisme dari rongrongan kelompok reaksioner atau kelompok yang tidak sejalan dengan sekularisme seperti kelompok Islam.

Pada kudeta tahun 1960, ketika itu pemerintahan dipimpin oleh Adnan Menderez dari Partai Demokrat yang memenangkan pemilu 1950. Ia yang pertama kali menentang dominasi militer dalam pemerintahan. Adnan menjanjikan reformasi politik dan pemulihan hak umat Islam. Langkah itu tentu saja mengundang kemarahan militer dan berujung pada kudeta tepatnya pada tanggal 27 Mei 1960. Adnan diseret ke pengadilan dengan tuduhan korupsi dan penyelewengan

---

<sup>12</sup> Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.104

konstitusi. Delapan belas bulan kemudian, militer mengembalikan pemerintahan ke pihak sipil.<sup>13</sup>

Kudeta 1971 dilakukan atas ketidakpuasan atas kondisi politik dan ekonomi. Ketika itu militer memaksa Perdana Menteri Sulayman Demiral mundur dari jabatan melalui memorandum yang dikirim kepada Perdana Menteri menuntut pembentukan pemerintahan yang kuat berdasarkan prinsip-prinsip kemalisme. Memorandum ini berujung pada pembubaran pemerintahan dan parlemen. Alasan kudeta sendiri masih misteri, namun ketika itu terdapat kelompok islamis yang tergabung dalam Partai Ketertiban Nasional yang semakin menunjukkan eksistensinya dimana partai ini secara terang-terangan menolak Kemalisme. Hasil dari kudeta ini adalah pembubaran Partai Ketertiban Nasional dan Partai Buruh, yang dianggap sebagai gerakan kiri dan juga ancaman terhadap ideologi Kemalisme.<sup>14</sup>

Saat kudeta 1980 terjadi karena adanya kekacauan politik domestik ditengah adanya perang dingin Amerika dan Uni Soviet. Namun kekacauan ini tidak lepas dari campur tangan militer sendiri. Militer dengan sengaja memanfaatkan kelompok sayap kanan, ultra nasionalis yakni partai MHP untuk memberangus kelompok kiri sehingga terjadi instabilitas politik. Kudeta ini mendapat dukungan penuh dari Amerika Serikat yang menjalankan Doktrin Monroe demi mencegah efek domino dari pengaruh komunisme di Asia Tengah.<sup>15</sup>

Kudeta tahun 1997 adalah penggulingan pemerintahan Islamis Erbakan. Partai Refah menjadi pewaris dua partai Islamis sebelumnya yang dibubarkan militer yakni Partai Ketertiban Nasional pada 1971 dan Partai Penyelamatan Nasional pada tahun 1980. Dibawah kepemimpinan Erbakan,

---

<sup>13</sup> Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.110

<sup>14</sup> Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.111

<sup>15</sup> Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.113

Partai Refah memenangkan pemilu parlemen 1995 dan berhak membentuk pemerintahan. Melalui koalisi dengan Partai Jalan Lurus, Erbakan membentuk pemerintahan yang dipimpin kubu islamis. Ketika itu militer menuduh Erbakan hendak mempersiapkan negara islam dan mengancam ideologi kemalisme. Melalui Dewan Keamanan Nasional, militer merancang memorandum bagi pengunduran diri Perdana Menteri Erbakan. Dalam skenario ini, Erbakan dipaksa mundur militer tanpa harus membubarkan parlemen dan membatalkan konstitusi, Operasi militer ini dirancang oleh para Jenderal yang ada di Dewan Keamanan Nasional. Pada 28 September 1997, Dewan Keamanan Nasional mengeluarkan memorandum tentang sekularisme dan politik Islam dalam pemerintahan. Memorandum ini menjadi pintu untuk memaksa mundur Erbakan.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Ahmad Dzakirin, Op.cit Hal.115